

SOCIETY

DPN Lantik Pengurus IPKN Wilayah Kalteng

PALANGKARAYA-Deewan Pengurus Nasional (DPN) Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) menyelenggarakan pelantikan pengurus IPKN wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan periode 2020-2023. Pelantikan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum DPN IPKN Prof Dr Bahrullah Akbar MBA CIPM CSFA CPA yang dilakukan secara virtual, Senin (26/10).

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalteng Ade Iwan Ruswana CSFA mengatakan, IPKN ini merupakan asosiasi profesi. Lantaran, Mpan RI mengharuskan adanya asosiasi profesi untuk pejabat fungsional pemeriksa maka dibentuk IPKN ini.

"Pembentukan di wilayah Kalimantan termasuk di Kalteng ini merupakan pembentukan terakhir dan berbarengan dengan pembentukan DKI Jakarta, daerah yang lain sudah. Kegiatan di-



PELANTIKAN: Pengurus IPKN wilayah Kalteng saat prosesi pelantikan pengurus IPKN wilayah Kalteng di auditorium BPK Kalteng, Senin (26/10).

lakukan secara virtual oleh DPN IPKN Pusat dan di Kalteng dilakukan di auditorium BPK Kalteng," katanya saat diwawancara usai pelantikan berlangsung.

Diungkapkannya, pen-

gurus IPKN di wilayah Kalteng untuk Ketuaanya yakni Kepala BPK langsung, sedangkan pengurus lainnya berasal dari para pejabat di lingkungan BPK Kalteng, pihak eksternal BPK terdiri dari

Perwakilan BPKP Kalteng akademisi Universitas Palangka Raya, akademi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (IAIN) dan Inspektorat Kalteng sebagai dewan konsultatif eksternal.

"Dengan dilantiknnya pengurus IPKN wilayah Kalteng diharapkan dapat mengembangkan profesi pemeriksa keuangan negara dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan

di wilayah Kalteng, guna mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara atau daerah," ungkapnya kepada awak media.

Dijelaskannya, IPKN merupakan organisasi

profesi pemeriksa keuangan negara yang telah diresmikan di Jakarta pada 20 Februari 2020 lalu. Organisasi ini diinisiasi oleh BPK RI selaku instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa keuangan negara.

"Harapannya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan pemeriksa melalui penyelenggaraan seminar, workshop dan pembangunan profesi," tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, BPK juga dapat berperan menjaga profesionalisme pemeriksa melalui pencegahan dan penindakan atas pelanggaran kode etik profesi. Ditambahkannya, BPK juga berperan aktif dalam mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Sebetulnya yang harus transparan yakni manajemen pemerintah, tapi bagaimana BPK berperan aktif dengan melakukan audit pemeriksaan keuangan maupun kinerja, yang artinya agar pengelolaan dan tanggung jawab yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik, untuk BPK Kalteng tentu saja wilayahnya adalah pemda Kalteng," pungkasnya. (**abw/b10/sma**)